

PENGARUH UPAH MINIMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI PULAU JAWA

Ardi Sulistiawan ^{1*}

Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246.Malang, Indonesia

*Corresponding author: ardisulistiawan6@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 20/08/2022

Revised 28/02/2023

Accepted 28/02/2023

Available online 02/03/2023

Keyword: ADHB's RGDP,
minimum wage, poverty,
unemployment.

JEL Classification
G22

Copyright (c) 2023
Sulistiawan, A.



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial-ShareAlike
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Abstract

This study aims to determine the effect of minimum wage, RGDP, and unemployment to poverty in Java Island Province in 2010 -2021. This study is a quantitative study using panel data and using a fixed effect model. The data used are minimum wage data, ADHB's RGDP, unemployment and poverty. The regression results from this study indicate that the minimum wage and ADHB's RGDP have a significant negative effect, while unemployment has a significant positive effect.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum, PDRB, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa tahun 2010 -2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan menggunakan model fixed effect. Data yang digunakan adalah data upah minimum, RGDP ADHB, pengangguran dan kemiskinan. Hasil regresi dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum dan RGDP ADHB berpengaruh negatif signifikan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif signifikan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian serius Pemerintah di semua negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, selain itu kemiskinan menjadi fokus bagi Pemerintah Indonesia dalam hal penanganannya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya fenomena sosial seperti kriminalitas, korupsi, pemutusan hubungan kerja, pengangguran, dll. Midgley (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup dibawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relative dibandingkan dengan individu lainnya dalam masyarakat. Kemiskinan di negara berkembang memiliki karakteristik yang hampir sama.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia (Kumalasari, 2011).

Pulau Jawa memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan intensitas tertinggi dibanding wilayah lainnya di Indonesia dalam hal kegiatan perekonomian. Kekayaan sumber daya alam, angkatan kerja usia muda yang berpendidikan, pasar domestik yang luas dan tumbuh secara cepat, digabungkan dengan kondisi sarana dan prasarana yang lengkap menjadi faktor keunggulan Pulau Jawa. Diluar itu semua banyak masalah yang perlu dibenahi di Pulau Jawa sehingga tingkat kemiskinan di Pulau Jawa masih relatif tinggi.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks, karena tidak hanya satu faktor saja yang mempengaruhinya ada faktor-faktor lain juga yang bisa mempengaruhi kemiskinan. Salah satu faktor kemiskinan di negara berkembang adalah pendapan nasional yang rendah. Hal itu merupakan dampak dari penetapan kebijakan upah minimum yang tidak tepat sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhannya karena upah minimum yang didapatkannya kurang.

Simanjuntak (1985), menyebutkan bahwa ada 3 hal yang menjadi kesalahan dalam sistem penentuan upah minimum. Yang pertama, Perbedaan persepsi antara pengusaha dan pekerja dimana upah dianggap sebagai beban. Semakin besar upah yang diberikan kepada pekerja maka akan semakin kecil keuntungan yang didapat oleh pengusaha, selain itu upah tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga segala sesuatu yang diberikan pengusaha kepada pekerjanya, seperti tunjangan beras, transportasi, kesehatan, konsumsi yang diberikan ketika pekerja sedang melaksanakan tugas, tunjangan saat libur, cuti dan sakit, fasilitas rekreasi dan lain sebagainya atau biasa disebut dengan natura dan *fringe benefits*. Kedua, Keanekaragaman sistem pengupahan dimana Besarnya proporsi upah dalam bentuk natura dan *fringe benefits* pada tiap-tiap perusahaan tidak sama, sehingga hal ini menyebabkan sering terjadinya kesulitan dalam perumusan kebijakan nasional, misalnya seperti dalam penentuan pajak pendapatan, upah minimum, upah lembur dan lain sebagainya. Ketiga, rendahnya tingkat upah dimana Pada saat ini masih banyak terdapat karyawan yang memiliki penghasilan rendah, bahkan lebih rendah dari kebutuhan fisik minimumnya, sehingga pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Hasil rata-rata dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan upah minimum pada Pulau Jawa setiap tahunnya dari tahun

2010-2021 DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan upah minimum tertinggi dengan rata-rata sebesar Rp. 2.834.559, disusul dengan Provinsi Banten sebesar Rp. 1.674.737, Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 1.269.105, Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp. 1.198.776, Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.168.771, dan yang terakhir adalah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.098.274.

Nilai PDRB akan menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan rata-rata PDRB ADHB tertinggi sebesar 2,05 milyar, disusul dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 1,76 milyar, Provinsi Jawa Barat sebesar 1,59 milyar, Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,04 milyar, Provinsi Banten sebesar 0,49 milyar dan yang terakhir adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,11 milyar. Nilai PDRB ADHB setiap Provinsi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun akan tetapi belum mampu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.

Tingkat pengangguran di Provinsi Pulau Jawa fluktuasinya cenderung menurun. Hasil rata-rata tingkat pengangguran pada tahun 2010 - 2021 Provinsi Banten menjadi yang tertinggi sebesar 9,99%, disusul Provinsi Jawa Barat sebesar 9,11%, Provinsi DKI Jakarta sebesar 8,55%, Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,51%, Provinsi Jawa Timur sebesar 4,52% dan yang terakhir adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 3,84%. Meskipun tingkat pengangguran cenderung turun, pemerintah tidak boleh menghilangkannya dari skala prioritas.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) yang menggunakan variabel dependen kemiskinan dan variabel tingkat pendidikan, PDRB, dan upah minimum sebagai variabel independennya dengan menggunakan data cross section yang diperoleh dari bps dari tahun 2005 samapi 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat upah minimum regional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Banten.

Penelitian tentang kemiskinan sudah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai macam variabel independen dan dengan metode kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) mempunyai persamaan dari segi variabel independen dan variabel dependennya dengan penelitian sebelumnya yang berjudul "Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB ADHK Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten". Perbedaan utama dengan penelitian yang dilakukan Dewi adalah ruang lingkupnya yang lebih luas, dimana penelitian sebelumnya menggunakan lingkup provinsi sedangkan penelitian ini lingkupnya Pulau Jawa, tahun yang digunakan juga berbeda, dan ada penambahan dan pengurangan dari segi variabel independennya.

Dari latar belakang permasalahan diatas, di Provinsi Pulau Jawa dalam periode 2010-2021 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya dibanding pulau lain di Indonesia adalah yang paling tinggi. Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke semua Provinsi di Pulau Jawa menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh Provinsi di Pulau Jawa, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi tiap Provinsi dalam usaha mengatasi kemiskinan di Pulau Jawa. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Analisis Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pengangguran, Terhadap Kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa”.

Suliswanto (2010), meneliti tentang kemiskinan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan di Indonesia 2006-2008. Hasil dari penelitian ini variabel produk domestik regional bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Riva et al., (2014), meneliti tentang kemiskinan yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, sedangkan pada variabel upah minimum berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Dalam proses analisis menunjukkan bahwa pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

Ayu (2018), meneliti kemiskinan yang memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Hasil menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, sementara variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Kristanto (2014), meneliti tentang kemiskinan yang bertujuan untuk untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pengangguran penduduk miskin di Brebes kabupaten selama periode 1997-2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan yaitu variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan variabel upah minimum dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Wijayanto (2010), meneliti tentang kemiskinan yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel PDB, pendidikan (melek huruf), pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 2005-2008 yang diharapkan dapat dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB ADHK berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pengangguran berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Perbedaan terkait variabel dan periode, dimana di penelitian terdahulu tidak ada yang meneliti menggunakan variabel independen upah minimum, PDRB ADHB, dan pengangguran, secara bersamaan dan dengan menggunakan periode 2010 - 2021. Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Dari penelitian sekarang terkait persamaan metodenya metodenya dengan penelitian terdahulu supaya penelitian yang dilakukan sekarang memiliki hasil yang akurat, sedangkan perbedaan terkait variabel dan periode dengan penelitian terdahulu diharapkan bisa memberikan hasil yang lebih komprehensif. Sehingga dalam menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan lebih akurat.

Kemiskinan adalah dimana kondisi minimal seseorang yang tidak bisa atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Prawoto (2009) kemiskinan itu diibaratkan seperti lingkaran setan (*the vicious circle of poverty*), yaitu menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan dikarenakan tabungan rendah, investasi rendah, kekurangan modal, rendahnya produktifitas, pendapatan rendah yang kembali menyebabkan tabungan rendah dan seterusnya.

upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah secara umum bisa diartikan sebagai pendapatan atas jasa yang telah dilakukan (rosandi dkk, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Produk Domestik Regional Bruto, merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit produksi baik berupa barang dan jasa dalam suatu wilayah. Kuncoro (2010), menyatakan

bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu Provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka produk domestik regional bruto.

Menurut Yanuar (2009), pengangguran adalah keadaan dimana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Secara umum pengertian pengangguran adalah orang yang belum memiliki pekerjaan tetap atau angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upah minimum, produk domestik regional bruto atas harga berlaku (ADHB), dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kuantitatif. Dengan menggunakan metode sampling jenuh yaitu semua populasi yang ada di Pulau Jawa. Data yang digunakan adalah data panel yang meliputi upah minimum, produk domestik regional bruto atas harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha, pengangguran, dan kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa pada tahun 2010-2021.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik dan untuk upah minimum pada tahun 2021 data diperoleh melalui surat keputusan Gubernur di masing-masing regional.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data panel. Dalam menentukan model terbaik dari analisis data panel ini menggunakan uji chow dan uji hausman. Analisis data panel ini menggunakan model *fixed effect* yang meliputi uji determinasi (R^2), uji t dan uji f. Variabel yang akan diteliti terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) yang terdiri dari upah minimum, produk domestik regional bruto atas harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha, pengangguran dan variabel terikat (*dependent variable*) menggunakan tingkat kemiskinan. Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

- Y : kemiskinan
- a : Konstanta
- $b_1b_2b_3$: koefisien regresi
- X_1 : Upah Minimum
- X_2 : produk domestik regional bruto atas harga berlaku (ADHB)
- X_3 : pengangguran

e :Kesalahan berdistribusi normal dengan rata-rata 0, tujuan perhitungan e diasumsikan nol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil regresi linier berganda terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Hasil Uji Chow

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 72.03762 | (5,63) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 137.1371 | 5 | 0.0000 |

Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H0 : Common Effect, jika nilai Probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$.

H1 : Fixed Effect, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan hasil uji Chow dengan redundant test diperoleh nilai probabilitas cross section F sebesar 0.0000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0.0000 < 0.05$) sehingga H0 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang tepat untuk digunakan dalam menguji hipotesis adalah model fixed effect.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

| Test Summary | ChiSq.Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-----------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 175.5224 | 3 | 0.0000 |

Perumusan hipotesis nya adalah sebagai berikut:

H0 : *Random Effect*, jika nilai Chi-squarenya tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$.

H1 : *Fixed Effect*, jika nilai Chi-squarenya signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan Tabel 2 diatas, diperoleh nilai distribusi chi-square sebesar 78.7097 dengan probabilitas chi-square 0.0000 dimana lebih kecil dari alpha 0.05 ($0.0000 < 0.05$) maka model yang tepat untuk digunakan adalah *fixed effect model*.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 4.215387 | 0.552431 | 7.630612 | 0.0000 |
| LogXI | -0.139917 | 0.035655 | -3.924178 | 0.0002 |
| LogX2 | -0.010373 | 0.004927 | -2.105375 | 0.0393 |

| | | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| LogX3 | 0.171150 | 0.075969 | 2.252886 | 0.0278 |
| R-squared | 0.963058 | Mean dependent var | | 2.161382 |
| Adjusted R-squared | 0.958367 | S.D. dependent var | | 0.486226 |
| F-statistic | 205.2995 | Durbin-Watson stat | | 0.606536 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Analisis regresi ini bertujuan buat menganalisis pengaruh upah minimum, produk domestik regional bruto atas harga berlaku (ADHB), dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa. sesudah dilakukan pengolahan menggunakan Eviews9 maka persamaan regresinya ialah

$$Y = 4.215387 - 0.139917 X_1 - 0.010373 X_2 + 0.171150 X_3 + e$$

1. Uji determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen Upah Minimum, PDRB, dan Tingkat Pengangguran. Dari hasil regresi menggunakan model fixed effect, nilai R^2 sebesar 0.9630, artinya adalah variabel dependen kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen Upah Minimum, PDRB, dan Tingkat Pengangguran sebesar 96.30 % dan sisanya sebesar 3.70% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

2. Uji F

Nilai prob (F-statistic) sebesar 0.000000, nilai ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas kurang dari 0.05 ($0.000000 < 0.05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dan Tingkat Pengangguran secara simultan mempengaruhi kemiskinan.

3. Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi atau tidak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung.

Berdasarkan tabel 3, maka dapat kita ketahui uji t sebagai berikut:

- a. upah minimum memiliki nilai koefisien -0.1399 dengan nilai t-hitung -3.9241 dan nilai probabilitas sebesar 0.0002. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0.0001 < 0.05$) sehingga secara statistik variabel upah minimum (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa.
- b. Produk domestik regional bruto atas harga berlaku (ADHB) memiliki nilai koefisien -0.0103 dengan nilai t-hitung -2.1053 dan nilai probabilitas sebesar 0.0393. Nilai probabilitas yang dihasilkan lebih dari $\alpha = 5\%$ ($0.0393 < 0.05$) sehingga secara statistik variabel produk domestik regional bruto

atas dasar harga konstan (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa.

- c. Pengangguran memiliki nilai koefisien 0.1711 dengan nilai t-hitung 0.0759 dan nilai probabilitas sebesar 0.0278. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0.0278 < 0.05$) sehingga secara statistik variabel pengangguran (X3) signifikan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa.

Hasil penelitian membuktikan bahwa koefisien upah minimum sebesar -0.1399 dan probabilitasnya sebesar 0.0002. Artinya ketika upah minimum naik sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Banten sebesar 0.1399%. Variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa. Hal tersebut sesuai dengan teori yaitu apabila upah minimum meningkat akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosandi et al., (2017), yang menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan.

Produk domestik regional bruto atas harga berlaku (ADHB) memiliki nilai koefisien -0.0103 dengan nilai t-hitung -2.1053 dan nilai probabilitas sebesar 0.0393. Artinya apabila PDRB ADHB naik sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Banten sebesar 0,0103%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (ADHB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa. Hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa apabila PDRB ADHB meningkat, akan menurunkan kemiskinan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ayu (2018), dimana hasilnya PDRB berpengaruh negatif dan signifikan.

Pengangguran memiliki nilai koefisien 0.1711 dengan nilai t-hitung 0.0759 dan nilai probabilitas sebesar 0.0278. artinya apabila pengangguran naik 1% maka akan meningkatkan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Banten sebesar 0.1711%. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. hal ini menunjukkan bahwa secara langsung peningkatan pengangguran bisa meningkatkan tingkat kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Soejoto & Karisma (2013), yang menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

Tabel 4. Hasil Intersep

| Provinsi | Koefisien | Koefisien Provinsi | Intersep |
|-------------|-----------|-----------------------|----------|
| DKI Jakarta | 4.2153 | -0.7655 | 3.4498 |
| Jawa Barat | 4.2153 | 0.0019 | 4.2172 |
| Jawa Tengah | 4.2153 | 0.4616 | 4.6769 |
| Yogyakarta | 4.2153 | 0.3595 | 4.6974 |
| Jawa Timur | 4.2153 | -0.5395 | 3.6758 |

Dapat dilihat tabel 4 menunjukkan masing-masing Provinsi memiliki koefisien *fixed effect* yang berbeda-beda antar Provinsi. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa variabel upah minimum, pdrb, dan pengangguran memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kemiskinan di setiap Provinsi di Pulau Jawa.

Dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki nilai intersep yang tinggi, sehingga apabila diasumsikan seluruh variabel independen dalam penelitian tidak berpengaruh, maka Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, artinya memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah dibandingkan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur.

Pada Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai intersep yang paling rendah, apabila diasumsikan seluruh variabel independen dalam penelitian tidak berpengaruh, maka Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi lain yang ada di Pulau Jawa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan Model estimasi yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect dimana hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka 0.963058 yang mana hasil dari regresi tersebut memiliki arti bahwa variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum, PDRB, dan tingkat pengangguran Provinsi di Pulau Jawa. Variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskina di Provinsi Pulau Jawa, hal ini dapat disimpulkan semakin tinggi upah minimum maka kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa akan menurun. Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi di Pulau Jawa, hal ini dapat disimpulkan semakin tinggi PDRB maka jumlah penduduk miskin Provinsi di Pulau Jawa akan menurun. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa, hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengangguran maka kemiskinan ikut meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*.
- Dita Sekar Ayu. (2018). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2010-2015)*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Giyanti Permata Dewi, I. (2016). *Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten*. JEQu, 6(1), 2541-1314. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>
- Indra Riko Rosandi, Muh. Jamal Amin, & Letizia Dyastari. (2017). *Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Penerapan Upah Minimum di Kota Samarinda)*. EJournal Ilmu Pemerintahan, 5(3), 1119-1130.
- Merna Kumalasari. (2011). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*. Skripsi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Mudrajad Kuncoro. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah dan Kebijakan*. In UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
http://opac.stainponorogo.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7588
- Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 08(2), 358-366.
- Nano Prawoto, & Selatan Jalan Lingkar. (2009). *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 9(1), 56-68.
- P Simanjuntak. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Prabowo Dwi Kristanto. (2014). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Tahun 1997-2012*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ravi Dwi Wijayanto. (2010). *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2005 - 2008*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

- Soejoto, A., & Karisma, A. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*. Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, 1–15.
- Vinny Alvionita Riva, Hainim Kadir, & Deny Setiawan. (2014). *Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau*. JOM FEKON, 1(2), 1–15.
- Yanuar. (2009). *Ekonomi Makro Suatu Analisis untuk Konteks Indonesia*. In Jakarta: Yayasan Mpu Ajar Artha.
http://lib.ummetro.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1427